



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah UPT adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT sesuai Wilayah kerjanya.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas.
- (2) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Wilayah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- d. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. memberikan layanan pengaduan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. memberikan pelayanan konseling dan advokasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan informasi terkait eksistensi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. memberikan layanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
7. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi korban tindak kekerasan;
8. melaksanakan pendampingan bagi korban tindak kekerasan;
9. melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan dinas/instansi teknis terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
10. menyusun laporan kegiatan;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;

- b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Koordinator Wilayah

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

Pasal 10

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Koordinator Wilayah UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

Para pejabat di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 diberi tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018



BUPATI PANDEGLANG,

Irna Narulita
IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

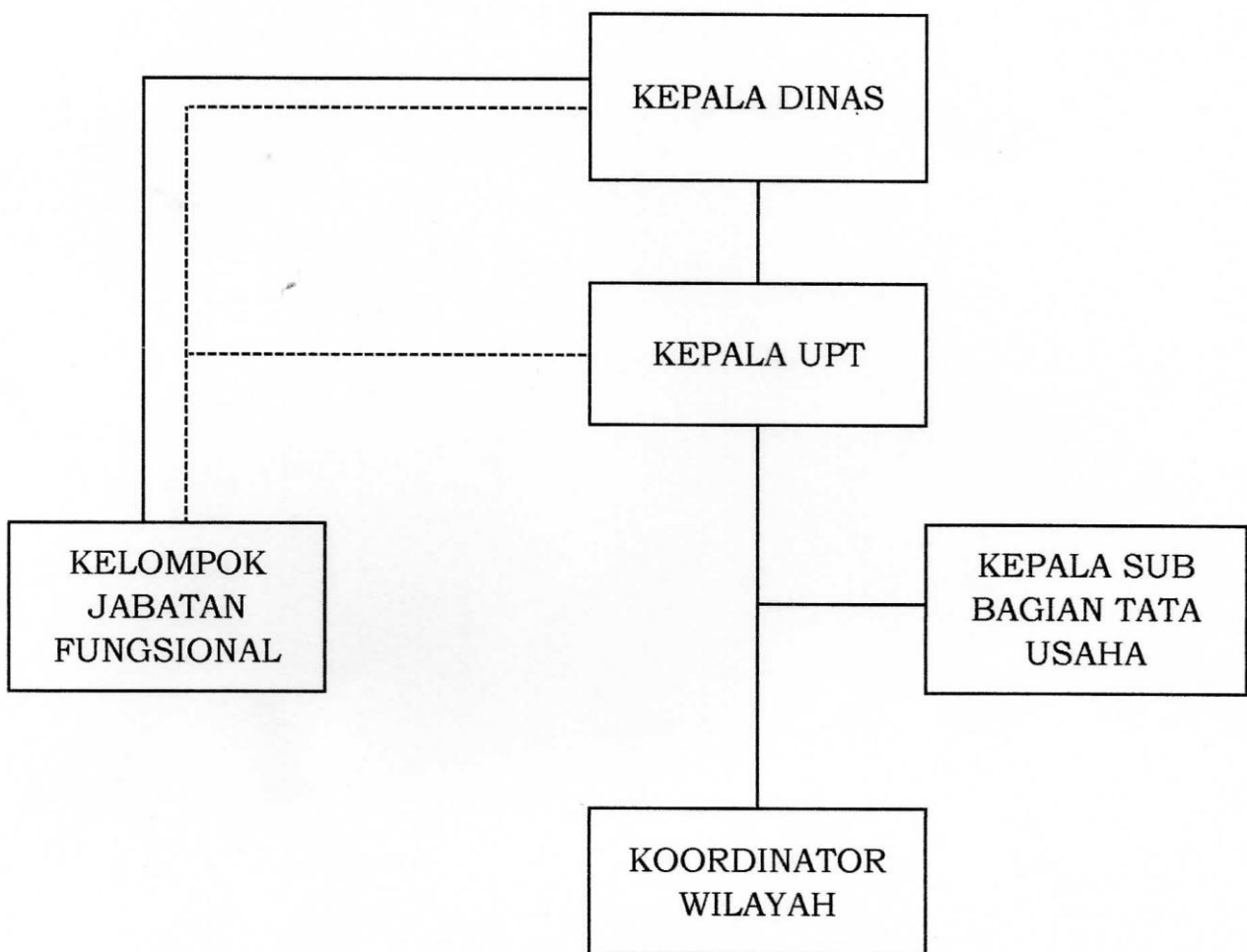


Pery Hasanudin
PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 33 TAHUN 2018
TANGGAL 14 Februari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**



BUPATI PANDEGLANG,

Irna Narulita
IRNA NARULITA